



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

# ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA PADANG PANJANG SEMESTER I TAHUN 2018

Oleh : Rayhan. SN

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang Semester I Tahun 2018 dan hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016, sehingga nantinya penelitian ini akan memberikan hasil apakah pengelolaan barang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang Semester I Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016. Dugaan sementara bahwasanyang ada 6 (enam) indikator dari pengelolaan barang milik daerah yang belum terlaksana dengan baik yaitu pada indikator penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitan didapat bahwasanyang permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu: 1; Minimnya sumberdaya manusia yang ikut terlibat secara langsung dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah pada rumah sakit umum daerah kota padang panjang. 2; Jarang mendapatkan pelatihan atau Diklat sehingga pengurus barang dan pembantu pengurus barang kurang mendapatkan keilmuan yang lebih baru akan pengelolaan barang milik daerah di lapangan. 3; Kurangnya koordinasi antara pihak manajemen (kasubag perencanaan, dan pengadaan) dengan pihak pengurus barang, efek yang ditimbulkan adalah tidak terbentuknya kerjasama yang baik dan mempengaruhi proses pengelolaan barang milik daerah serta timbulnya permasalahan terhadap pencatatan dan penataan yang luput dari pengurus barang. 4; Masalah kesejahteraan. 5; Ada oknum pengguna barang (user) yang menyepelakan fungsi dari barang tersebut, dan menyepelakan hal yang bersifat administrasi dalam peminjaman barang. 6; Lambannya proses penghapusan barang karena prosedur yang berbelit-belit.*

**Kata Kunci : Pengelolaan Barang Milik Daaerah**